

# LAPORAN AKHIR



## ANALISIS ETIKA PROFESI

(Studi Kasus: *Social Credit System Project of China*)

Tim Peneliti:

Herlina	10181027
Muhammad Rafli	10181051
Nurul Azizah	10181059
Syamsia Wati	10181074

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
BALIKPAPAN  
2021

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 *Social Credit System* di China**

*Social Credit System* (SCS) merupakan sebuah program yang disusun dalam perencanaan pemerintah pada tahun 2014 dan hingga saat ini masih dalam perencanaan pembangunan. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mengumpulkan data pribadi kalangan masyarakat, hal ini menjadi sebuah kecemasan bagi warga masyarakat yang merasa privasi mereka terusik. Pemerintah melihat program ini sebagai program untuk membangun kepercayaan warga masyarakat kepada pemerintah dengan mengatur perilaku pribadi masyarakat <sup>1</sup>.

*Social Credit System* (SCS) merupakan sebuah ide dasar dari China yang digunakan untuk memberikan sebuah sistem berbasis data yang komprehensif guna meningkatkan perilaku pribadi masyarakat. Ada dua elemen dasar SCS. Pertama, seperangkat data yang mengintegrasikan data yang dimiliki oleh badan pemerintah dan nonpemerintah di seluruh RRC dan perluasan sarana pengumpulan data. Elemen kedua adalah sistem yang memastikan warga negara dan entitas lain lebih bersungguh-sungguh dan dapat diandalkan. Ini menciptakan sistem penilaian yang komprehensif untuk kredit sosial setiap orang. Skor total dapat diperoleh karena mengintegrasikan berbagai sistem pengumpulan data. SCS mencakup empat lingkup pengukuran untuk mengasumsikan apakah orang mematuhi hukum dan kewajiban sosial atau tidak, yaitu ketulusan dalam urusan pemerintahan, ketulusan komersial, ketulusan masyarakat, dan kredibilitas peradilan. Sistem ini menilai reliabilitas orang, badan usaha dan sosial, dan lembaga pemerintah. Data besar dimanfaatkan untuk melakukan kontrol dan pengelolaan sosial dengan mengatasi masalah-masalah di masyarakat dan mencegah ketidakstabilan sosial sejak dini<sup>2</sup>. Kontroversi muncul ketika Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRC) mengeluarkan kebijakan yang memperkenalkan sistem kredit sosial. Langkah awal

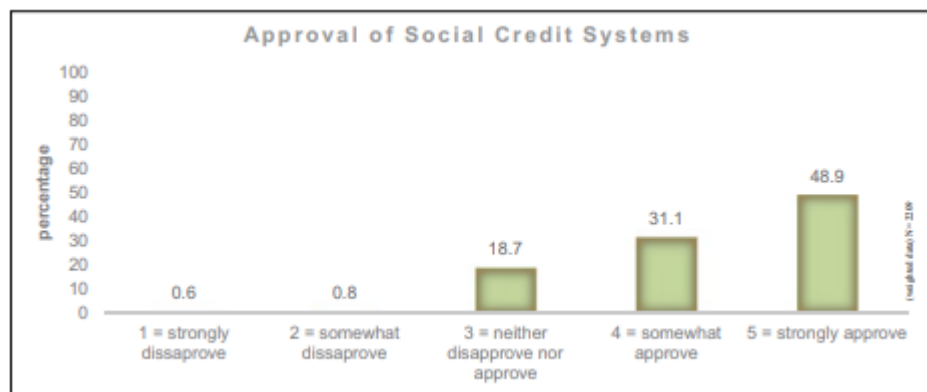
---

<sup>1</sup> Martin Chorzempa, Paul Triolo, dan Samm Sacks dengan judul “Sistem Kredit Sosial di China: Tanda Kemajuan atau Ancaman Terhadap Privasi?” dalam Jurnal Institut Peterson Ekonomi Internasional, 2018.

<sup>2</sup> Cokorda Istri Chandra Devi Padmananda, I Nyoman Suyatna, dengan judul “What Indonesia Should Learn from China's Social Credit System?: Measuring Government Authorities and Citizen's Privacy Rights” dalam Udaya Journal of Law and Culture

diambil dengan mengoperasikan lebih dari 200 juta kamera pengintai, untuk ditempatkan terutama di ruang publik seperti jalan, supermarket, mal, dan gedung pemerintah di seluruh negeri. Mungkin melihat beberapa kegiatan praktis masyarakat: siapa yang mereka temui, apa yang mereka beli, atau apa yang mereka lakukan. Mekanisme pemantauan ini akan mengancam privasi individu dalam kehidupan mereka.

Program SCS ini berjalan dengan memberikan poin/score kepada individu/institusi. Apabila memiliki poin yang tinggi, maka pihak tersebut dapat mengakses berbagai fasilitas publik dan akses lainnya seperti transportasi publik, perbankan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan pihak yang memiliki poin/score yang rendah tidak dapat mengakses apapun, seluruh akses kepada pihak tersebut akan ditutup. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, SCS berdasarkan mekanisme pemberian reward dan pemberian punishment berdasarkan sistem penilaian. Daftar hitam pada dasarnya diberlakukan oleh Mahkamah Agung yang mengikat secara hukum. Selain itu, Kementerian Pemerintah tertentu juga dapat melaksanakannya. Program ini terus berjalan dan mendapatkan respon positif dari masyarakat Tiongkok. Berikut adalah hasil analisis yang didapat mengenai persetujuan dan respon masyarakat terhadap program SCS ini <sup>3</sup>.



---

<sup>3</sup> Genia Kostka dengan judul “China’s social credit systems and public opinion: Explaining high levels of approval” dalam Sage Journals, 2019.

## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Identifikasi Masalah Etika

- *Could this decision or situation be damaging to someone or to some group, or unevenly beneficial to people? Does this decision involve a choice between a good and bad alternative, or perhaps between two “goods” or between two “bads”?*

Mungkinkah keputusan atau situasi ini merusak seseorang atau kelompok tertentu, atau tidak merata bermanfaat bagi orang lain? Apakah keputusan ini melibatkan Pilihan antara alternatif yang baik dan buruk, atau mungkin antara dua "baik" atau antara dua "keburukan"?

**Jawab :**

Berdasarkan dari kasus yang telah di analisis, diketahui bahwa dalam kebijakan *social credit system (SCS) project* dapat menjadi pilihan alternatif yang baik dan dapat menguntungkan beberapa pihak di China. Pemerintah China berniat untuk melakukan *monitoring* terhadap kehidupan masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas di China karena masyarakat dapat tetap berada lingkup yang diatur oleh peraturan pemerintah mengingat China memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. SCS bertujuan untuk membuat data publik, mirip dengan inisiatif Pemerintah Terbuka 2013 pada era pemerintahan Obama. Beberapa dari kumpulan data publik di China ini adalah daftar hitam untuk memperingatkan publik agar tidak berurusan dengan pelanggar atau orang yang memiliki perilaku buruk dan menggunakan tekanan publik untuk mengubah perilaku mereka. *Social credit system project* juga bertujuan untuk memperluas sistem penilaian kredit keuangan yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan ke bidang peraturan pemerintah lainnya, mulai dari penegakan kontrak hingga keamanan pangan, korupsi, dan perlindungan lingkungan. Skema Ponzi selama bertahun-tahun, bencana lingkungan, dan ketakutan akan keamanan pangan di Tiongkok telah mengikis kepercayaan terhadap integritas tindakan pemerintah di antara rakyat Tiongkok. Para pemimpin China melihat SCS sebagai upaya untuk menopang kepercayaan pada pemerintah dan mengatur bisnis dan perilaku pribadi dengan meyakinkan mereka bahwa keputusan dibuat berdasarkan data dan bukan keinginan sembarangan. Rencananya adalah

untuk menghubungkan data publik dan pribadi tentang perilaku keuangan dan sosial di seluruh China, menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi perilaku individu dan organisasi, dan menghukum atau memberi penghargaan kepada mereka sesuai dengan standar perilaku yang sesuai yang disepakati. SCS yang diatur dengan baik dapat membawa transparansi, mengawasi mereka yang berkuasa, mengatur ekonomi dengan intervensi pemerintah yang lebih sedikit, dan mendorong orang untuk memperlakukan satu sama lain dengan lebih adil, seperti yang dipertahankan oleh pemerintah.

Sehingga dari situasi ini, dapat diketahui bahwa SCS dapat memberikan manfaat yang baik bagi Pemerintah China untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat China dalam hal pembangunan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini. Selain itu, dalam situasi ini juga memberikan manfaat kepada perusahaan dan lembaga pemerintah di bidang keuangan karena dari histori data *social credit* masyarakat dapat membantu dalam menentukan masyarakat yang layak diberikan prioritas pinjaman. Sebagian masyarakat China juga merasa diuntungkan dari adanya kebijakan ini karena dapat memperoleh layanan prioritas jika memiliki poin *social credit* yang tinggi. Masyarakat China merasa aman hidup dalam lingkungan masyarakat karena dapat mengetahui kredibilitas perilaku seseorang sehingga dapat menghindari berurusan dengan orang yang memiliki *record social credit* yang buruk. *Social credit* juga dirasa dapat membantu lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintahan lainnya dalam menjalankan tugas. Rekaman aktivitas masyarakat yang terus dipantau dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan penyelidikan kasus kriminal.

Namun, kebijakan untuk mengumpulkan data pribadi dapat menimbulkan masalah yang dapat membahayakan keselamatan individu atau sekelompok masyarakat China. Kebijakan *Social credit system* ini berpotensi disalahgunakan untuk kontrol sosial, mengorek setiap aspek kehidupan warga negara China dan secara otomatis menghukum mereka yang tidak mengikuti garis partai. Seperti di Negara Barat, sadar bahwa penggunaan dan penyalahgunaan data yang dikumpulkan secara pribadi, menimbulkan pertanyaan moral dan ekonomi tentang pengumpulan dan penggunaan data. Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah implikasi sistem kredit sosial untuk kebebasan berbicara, misalnya, jika komentar kritis tentang pemerintah akan menurunkan skor kredit sosial seseorang. Selain itu, jika penyimpanan data *social credit* masyarakat China disimpan dalam *database* yang terpusat, maka akan menjadi sasaran utama pelaku

kejahatan di Internet (*Cyber Crime*) yang berasal dari China itu sendiri ataupun seluruh dunia. Data-data penting milik masyarakat yang terintegrasi antara data publik dengan data pribadi berpotensi meningkatkan angka kriminalitas sekaligus mengancam keselamatan masyarakat di China apabila data yang bocor diperjual belikan kepada mafia atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kami menilai bahwa *social credit* tidak memberikan *benefit* yang merata kepada seluruh masyarakat China. Hal ini dikarenakan kesenjangan sosial yang terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, masyarakat yang pro pemerintah dengan masyarakat yang oposisi dengan pemerintah. Masyarakat yang kaya memiliki *privilege* untuk membentuk citra yang baik di mata masyarakat menggunakan kekayaannya. Dengan pencitraan bisa menciptakan “*image palsu*” maka akan dihitung sebagai perilaku baik oleh sistem dan meningkatkan poin *social credit* nya. Dari poin *social credit* yang tinggi maka dapat mengakses pelayanan publik yang diprioritaskan. Di sisi lain orang yang memiliki poin rendah semakin sulit mendapatkan layanan untuk mendapatkan pelayanan publik seperti pendidikan, transportasi, keuangan, dan sebagainya. Keadaan ini akan menciptakan *gap* atau kesenjangan yang berkelanjutan.

- ***Is this issue about more than solely what is legal or what is most efficient? If so, how?***

Apakah masalah ini lebih dari sekadar apa yang legal atau apa yang paling efisien?  
Jika demikian, bagaimana?

Jawab :

Kebijakan *social credit* ini dinilai dapat memicu polemik dan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya potensi “bias” atau kesalahan dalam memberikan penilaian *social credit* kepada masyarakat. misalnya jika terjadi pertikaian antar individu maka seseorang dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam padahal duduk permasalahan tidak diketahui. Padahal dalam hukum, seseorang tidak dapat langsung dinilai bersalah sebelum dilakukan penyelidikan. Selain itu, *social credit* ini berpotensi dimanipulasi oleh orang yang memiliki wewenang (*hack*) sehingga dapat menguntungkan diri sendiri dan golongan. Menurut kami, sistem ini juga berpotensi disalahgunakan dan menjadi senjata dalam mengkriminalisasi masyarakat yang memiliki prinsip yang berseberangan atau oposisi dengan partai pemerintah. Dimana poin *social credit* dan bukti

pelanggaran dapat dimanipulasi untuk menjebak seseorang atau kelompok. Akibatnya, orang yang mendapatkan poin yang rendah mendapatkan hukuman dan memicu adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Misalnya sanksi pertama dimulai dengan pengenaan denda dan dapat dilanjutkan dengan larangan bepergian (pesawat atau kereta api cepat). Salah satu hukuman yang paling berdampak secara ekonomi bagi penduduk yang masuk daftar hitam adalah pembatasan untuk membeli barang dan jenis barang tertentu dari rekening bank mereka. Sangat jelas bahwa sistem seperti itu melanggar hak privasi yang diakui secara internasional, di mana setiap orang dilindungi untuk tidak diserang kehormatan dan reputasinya. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok: *“Kebebasan dan privasi korespondensi warga negara Republik Rakyat Tiongkok dilindungi oleh hukum. Tidak ada organisasi atau individu, dengan alasan apa pun, dapat melanggar kebebasan dan privasi korespondensi warga negara kecuali dalam kasus di mana, untuk memenuhi kebutuhan keamanan negara dalam penyelidikan kejahatan.*

## **2.2 Fakta Pada Permasalahan Social Credit System**

- ***What are the relevant facts of the case?***

Apa fakta-fakta yang relevan dari kasus ini?

Jawab :

Berdasarkan kasus yang telah di analisis, terdapat fakta dari permasalahan Social Credit dari beberapa jurnal bahwa implementasi dari Social Credit ini meskipun mendapat respon positif dari warga China akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sistem ini digunakan untuk mencegah terjadinya kriminalitas di Tiongkok. Mengingat bahwa warga Tiongkok yang cukup banyak, tentunya adanya monitoring ini akan mempermudah pemerintah dalam mengatur kriminalitas di Tiongkok. Namun hal ini turut menjadi masalah, mengingat proses dan input yang diberikan kepada sistem akan mengganggu privasi dari masyarakat.
2. Sistem ini berpotensi menghasilkan pelaku palsu. Yang dimaksud dengan pelaku palsu disini adalah apabila seseorang melakukan sesuatu namun ternyata pihak tersebut tidak bersalah dan aksesnya telah dibatasi, hal ini akan

menjadikan program ini sebagai program yang tidak adil bagi pihak yang tidak bersalah.

3. Sistem ini memberlakukan poin/score yang diberikan kepada pihak tertentu. Dengan maksimal score 800, semakin tinggi poin yang dimiliki oleh seseorang maka semakin mudah akses dan semakin banyak akses yang diberikan pemerintah oleh pihak tersebut. Berdasarkan dari sistem yang diterapkan pada SCS ini, poin akan diberikan berdasarkan bagaimana perilaku seorang pihak dalam bertindak. Semakin baik tindakan yang ia lakukan, maka akan diberikan poin yang semakin tinggi, namun semakin buruk tindakan yang ia lakukan maka semakin sedikit dan menurun poin yang diberikan.
4. Daftar hitam putusan pengadilan dibuat ketika sistem pengadilan China meluncurkan platform online pada tahun 2013, yang secara terbuka menyebutkan mereka yang menolak untuk mematuhi putusan pengadilan dan membuat mereka dikenai “hukuman kredit.” Tingkat ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan menunjukkan mengapa sistem seperti social credit diperlukan. Ketidakmampuan untuk menegakkan penilaian mengikis kredibilitas pengadilan dan hukum.
5. Hukuman kredit sosial dalam transportasi mulai online pada 1 Mei 2018. Meskipun inisiatif ini secara nominal merupakan bagian dari SCS, tampaknya hanya melacak mereka yang melanggar aturan di kereta, dari pelanggaran kecil hingga yang serius seperti memblokir pintu dan memasukkan orang lain ke dalam. Mereka yang bersalah atas pelanggaran yang lebih serius ini dapat dilarang bepergian dengan kereta api selama enam bulan (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional 2018), dan mereka yang terlibat dalam perkelahian atau penyerangan terhadap staf maskapai penerbangan dapat dilarang terbang selama satu tahun.
6. Social Credit System pada dasarnya meningkatkan penegakan hukum di bidang yang penting, karena denda yang diberlakukan sebelumnya tidak efektif dalam mengekang perilaku seperti itu.
7. Daftar hitam pada dasarnya diberlakukan oleh Mahkamah Agung yang mengikat secara hukum. Selain itu, Kementerian Pemerintah tertentu juga dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, Kementerian Kebudayaan dan



Pariwisata dapat menetapkan orang yang melanggar aturan dalam transportasi, seperti merokok atau membawa barang terlarang.

8. Situs web utama yang mencantumkan nama-nama orang yang masuk daftar hitam tersedia untuk umum, artinya semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah. Sangat jelas bahwa sistem seperti itu melanggar hak privasi yang diakui secara internasional, di mana setiap orang dilindungi untuk tidak diserang kehormatan dan reputasinya.

- ***What facts are not known?***

Fakta apa yang tidak diketahui?

Jawab :

Dari fakta di atas belum diketahui bagaimana dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat China yang mendapatkan poin *Social credit* yang rendah. Tentunya dengan adanya *punishment* yang diterapkan oleh pemerintah dan *stakeholder* lainnya sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat yang mendapatkan diskriminasi dan hukuman dari *social credit*. Dalam kasus ini juga belum diketahui bagaimana respon atau penerimaan masyarakat dengan membandingkan aspek privasi dan keselamatan pribadi daripada kepentingan penertiban dan keamanan umum oleh pemerintah. Bisa jadi masyarakat menerima program yang diterapkan pemerintah karena mementingkan keamanan umum dibandingkan privasi dan keselamatan pribadi.

Dari kasus ini juga belum diketahui berapa tingkat ***accuration, precision, recall, dan error MSE*** dari *machine learning* yang digunakan untuk memberikan penilaian *social credit*. Hal ini menyangkut ketepatan dalam memberikan poin. apabila akurasi yang dimiliki rendah maka besar potensinya untuk melakukan kesalahan apalagi jumlah data yang dikelola sangat besar dan mencapai jutaan data per detik. Dari kasus ini belum juga diketahui bagaimana pengelolaan data dari sistem yang dipakai, pihak yang bertanggung jawab, tata kelola, dan mekanisme keamanannya.

Salah satu hal yang belum dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana tingkat kesenjangan yang ditimbulkan dari *Social Credit System* ini. Sebagian besar tampaknya tidak memahami kontrol *social credit* yang mencakup semua kemungkinan akan sampai kemana, dan tidak ada debat publik tentang

penerapan sistem di dalam China. Secara pribadi, ada beberapa keresahan di kelas menengah yang berpendidikan tentang skor warga yang menjadi satu-satunya kriteria untuk penilaian karakter. Tapi itu tidak akan menghentikan penerapan. Partai menggunakan sistem untuk memenangkan kembali sebagian kendali yang hilang ketika China membuka diri ke dunia pada tahun 1980-an dan diikuti perkembangan pesat. Ini adalah cara untuk membungkam perbedaan pendapat dan memastikan dominasi absolut Partai. Sudah sekitar 10 juta orang dihukum untuk masalah percobaan *social credit*. Wakil Presiden Amerika Serikat pada tahun 2018 menitikberatkan skor kredit sosial itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, kata Pence, "(sistem skor tersebut) akan 'memudahkan mereka yang dipercaya oleh pemerintah china untuk berpergian kemana pun, (tetapi) akan menyulitkan mereka yang memiliki skor buruk untuk mengambil satu langkah pun. Salah satu kaum di masyarakat yang terdampak atas kebijakan *social credit* ini adalah minoritas Muslim Uighur yang berada di Provinsi Xinjiang, Cina. Pemerintah Cina sejak 2017 melakukan aksi bersih - bersih Muslim Uighur memanfaatkan aplikasi komputer yang dibuat CETC, perusahaan pencipta peralatan militer yang dimiliki pemerintah Cina.

- ***Can I learn more about the situation? Do I know enough to make a decision?***

Bisakah saya belajar lebih banyak tentang situasi ini? Apakah saya cukup tahu untuk membuat keputusan?

Jawab :

Dari kasus ini dapat diketahui bahwa kebijakan *social credit system project* yang dicanangkan oleh pemerintah China belum sepenuhnya memberikan manfaat, keadilan dan keamanan bagi pemerintah serta masyarakatnya sendiri. Dari permasalahan ini dapat diketahui bahwa kebijakan ini bukan hanya dapat menekan angka kriminalitas di China namun juga dapat memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan negara dari China itu sendiri. Timbulnya kesenjangan sosial, adanya pelanggaran ham mulai dari pelanggaran ham atas pelayanan sebagai hak warga negara (misalnya perlindungan hukum, keuangan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sebagainya) hingga adanya upaya genosida untuk menghapuskan kaum minoritas. kebijakan ini berpotensi menjadi

senjata bagi pemerintah untuk menyerang oposisi dan kaum minoritas. Serta adanya potensi error dari sistem yang menyebabkan adanya kesalahan dalam memberikan poin pada masyarakat. serta keamanan data pribadi dan publik yang menjadi ancaman besar bagi pemerintah dan masyarakat secara umum.

- ***What individuals and groups have an important stake in the outcome? Are some concerns more important? Why?***

Individu dan kelompok apa yang memiliki kepentingan penting dalam hasilnya? Apakah beberapa kekhawatiran lebih penting? Mengapa?

Jawab :

Dalam kasus ini terdapat beberapa kepentingan yang perlu diperhatikan, mulai dari kepentingan pemerintah untuk menertibkan dan mencegah terjadinya kriminalitas, serta membantu lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintahan lainnya dalam menjalankan tugas. Kepentingan masyarakat dalam kasus ini adalah mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintah dan layanan publik untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan ketertiban di dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Selain itu, masyarakat china juga berhak atas perlindungan data pribadi dan privasi serta penegakan hak asasi manusia yang setara dengan masyarakat lainnya.

Menurut kami, kepentingan masyarakat atas perlindungan data pribadi dan privasi serta penegakan hak asasi manusia merupakan hal yang utama dalam kasus ini. Karena perlindungan data pribadi dan privasi masyarakat merupakan hal yang krusial, apabila data pribadi masyarakat jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dapat membahayakan keberlangsungan hidup pribadi dan keluarga. Selain itu, setiap masyarakat juga berhak untuk mendapatkan layanan publik. Jika masyarakat melakukan pelanggaran maka hukuman yang didapatkan harus setara dengan kejahatan yang dilakukan, bukan dengan membatasi layanan publik yang dapat diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat yang berakibat menimbulkan permasalahan lainnya.

- **What are the options for acting? Have all the relevant persons and groups been consulted? Have I identified creative options?**

Sehingga dari fakta di atas, diperoleh beberapa pilihan yang dapat diimplementasikan di China untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat yaitu :

- Menerapkan sistem *social credit* dengan batasan pengambilan data pribadi masyarakat yaitu hanya pada tempat-tempat atau sektor yang berkaitan. Misalnya untuk mendapatkan layanan transportasi maka penentuan pemblokiran layanan atau *punishment* hanya berdasarkan histori atau catatan perilaku atau sikap setiap individu. Atau jika melakukan kecurangan pada dunia pendidikan maka yang dibatasi adalah dalam hal dunia pendidikan. Jika melakukan pelanggaran dalam bidang keuangan maka yang dibatasi adalah layanan keuangan. Sehingga *punishment* diberikan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.
- Data daftar hitam atau poin *social credit* diambil dari lembaga pemerintah terkait atau berdasarkan catatan kriminal pihak keamanan atau kepolisian setempat, bukan berdasarkan pengintaian melalui cctv untuk mengawasi seluruh perilaku masyarakat. sehingga tidak mengganggu privasi dan data pribadi yang dapat membahayakan keselamatan individu atau kelompok orang.
- Pemerintah, pengadilan, dan pihak berwenang menggunakan sistem yang menjaga privasi atau data pribadi setiap masyarakat. Pemerintah tidak menjadikan *social credit* sebagai alat untuk mempermalukan masyarakat melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang. Sehingga tidak muncul kesenjangan sosial di masyarakat, karena berpotensi timbulnya *bullying*, perlakuan semena-mena, dan mendiskreditkan masyarakat yang dipandang rendah karena memiliki poin rendah.
- Pengambilan keputusan untuk pemberian poin sistem *social credit*

harus melalui prosedur hukum yang ada. karena dalam undang-undang china disebutkan bahwa *Tidak ada organisasi atau individu, dengan alasan apa pun, dapat melanggar kebebasan dan privasi korespondensi warga negara kecuali dalam kasus di mana, untuk memenuhi kebutuhan keamanan negara dalam penyelidikan kejahatan.* Sehingga pemberian hukuman harus melalui proses penyelidikan kejahatan terlebih dahulu, bukan dengan menggunakan hasil tangkapan data kemudian seseorang divonis bersalah.

### 2.3 Evaluasi Alternatif Solusi

Berdasarkan analisis dengan menggunakan *framework ethical decision making* berdasarkan enam lensa etis yaitu melakukan evaluasi opsi dengan mengajukan pertanyaan berikut:

- Pilihan mana yang paling menghormati hak semua orang yang memiliki saham? (The Rights Lens)
- Pilihan mana yang memperlakukan orang dengan adil, memberi mereka masing-masing apa yang menjadi hak mereka? (The Justice Lens)
- Opsi mana yang akan menghasilkan yang paling baik dan paling sedikit merugikan bagi sebanyak mungkin pemangku kepentingan? (The Utilitarian Lens)
- Pilihan mana yang paling baik melayani komunitas secara keseluruhan, bukan hanya beberapa anggota? (The Common Good Lens)
- Pilihan mana yang membuat saya bertindak sebagai orang yang saya inginkan? (The Virtue Lens)

Berdasarkan opsi di atas, maka didapatkan penjelasan mengenai opsi solusi adalah sebagai berikut.

1. The Right Lens: Untuk menghormati dan menghargai hak semua orang yang mendapatkan poin atau skor yang tinggi, maka pemerintah memberikan akses dan memperluas akses fasilitas publik kepada pihak yang memiliki score tinggi. Namun, pada pihak dengan score yang rendah, pemerintah akan membatasi dan menutup keleluasaan akses fasilitas publik sehingga warga dapat berwaspada.

2. The Justice Lens: Seperti yang telah dijelaskan mengenai konsep program ini, setiap orang akan diperlakukan adil sesuai dengan score yang telah didapatkannya.
3. The Utilitarian Lens: Pada teori ini menentukan benar dan salah serta berfokus pada hasil dalam bentuk konsekuensialisme melalui penalaran moral yang digunakan dengan cara memperhitungkan biaya dan manfaat.
4. The Common Good Lens: Pada opsi ini berfokus pada kepentingan bersama pada semua pihak yaitu dengan cara memberikan poin dan skor tinggi atau hukuman. Untuk yang melakukan kebaikan sendiri akan diberikan kemudahan dalam mengakses fasilitas publik. Untuk manfaat dari kebaikan yang dilakukan dengan menggunakan Social Credit ini sendiri akan berdampak secara turun temurun ke keluarga atau teman dekat bukan hanya untuk individu.
5. The Virtue Lens: Dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keleluasaan dalam menggunakan fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintahan kepada pihak yang memiliki poin yang tinggi akan menjadikan motivasi dan menurunkan niat seseorang dalam bertindak yang semena-mena dan melanggar hukum.

Setelah menganalisis berdasarkan hasil definisi dari opsi solusi di atas, maka didapatkan hasil evaluasi terhadap pilihan-pilihan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. The Right Lens: Untuk menghormati dan menghargai hak semua orang maka dapat digunakan pilihan kedua dan ketiga. Dijelaskan pada pilihan kedua bahwa data-data tersebut dapat dimasukkan kedalam daftar hitam dan menggunakan rekaman cctv sebagai tambahan bukti pada suatu kasus, hal ini dapat mengurangi tingkat bahaya pada masing-masing individu. Pilihan ini berkaitan dengan pilihan ketiga, dimana hanya pemerintahan, pengadilan dan juga pihak yang berwenang yang dapat mengakses sistem dan tidak mempublikasikan hasilnya sehingga mempermalukan individu tersebut.
2. The Justice Lens: Pada opsi ini pilihan harus dapat berlaku adil kepada seluruh orang sehingga dapat menggunakan pilihan keempat dimana pengambilan keputusan peradilan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang telah berlaku.
3. The Utilitarian Lens: Pada opsi ini ditentukan pilihan yang memiliki dampak paling baik dan tidak merugikan banyak pihak. Setelah mempertimbangkan opsi ini dengan pilihan-pilihan yang ada, didapatkan pada pilihan kedua dan ketiga memiliki dampak yang paling baik dan tidak merugikan banyak pihak. Dengan

menggunakan pilihan kedua tidak akan mengganggu privasi masyarakat dan sistem hanya akan dipegang oleh pemerintah sehingga tidak mempermalukan individu dan timbul kesenjangan sosial sesuai dengan pilihan yang ketiga.

4. The Common Good Lens: Pada opsi ini difokuskan pada kepentingan seluruh pihak untuk mendapatkan poin dan hukuman. Pilihan pertama dan keempat dapat diimplementasikan pada opsi ini dikarenakan pada pilihan pertama seperti menerapkan batasan-batasan tertentu pada penerima hukuman yang disesuaikan dengan histori mereka, sehingga hukuman akan diberikan sesuai dengan perilaku mereka. Adapun pada pilihan keempat dikatakan bahwa seluruh pihak yang bersangkutan akan diadili dan/atau diberikan hadiah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
5. The Virtue Lens: Pada opsi ini difokuskan pada kenyamanan penggunaan fasilitas publik. Pilihan pertama, ketiga, dan keempat dapat diimplementasikan dalam opsi ini. Hal ini dikarenakan pada pilihan pertama adanya batasan pengambilan sehingga menyesuaikan antara hukuman dan perilaku masyarakat, selain itu dengan memberikan wewenang dan hak akses sistem hanya kepada pemerintah, pengadilan maupun pihak yang berwenang akan membantu untuk menurunkan kemungkinan tingkat terjadinya diskriminasi dan *bullying*. Pada pihak yang terlibat juga akan diproses oleh prosedur hukum yang berlaku.

## 2.4 Implementasi Solusi

- *After an evaluation using all of these lenses, which option best addresses the situation?*

Setelah evaluasi menggunakan semua lensa ini, opsi mana yang paling sesuai dengan situasi?

Jawab :

Berdasarkan *lenses* yang telah dianalisis, maka adapun opsi yang tepat diterapkan untuk kasus kebijakan *social credit system project* di China adalah pertama, adanya pembatasan atau pengkategorian hadiah dan hukuman yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Jika hanya masyarakat yang memiliki poin tinggi yang bebas mengakses layanan maka akan

mengakibatkan kesenjangan dan ketertinggalan untuk masyarakat miskin dan kaum minoritas. Kemudian poin *social credit* masyarakat disimpan oleh pihak pemerintahan dan catatan kriminal kepolisian dan hanya digunakan untuk proses pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak menggunakan tekanan masyarakat untuk mengucilkan dan mengubah perilaku masyarakat yang memiliki poin *social credit yang rendah*. Apalagi untuk mengucilkan kaum minoritas dan pihak oposisi pemerintah. Pemerintah wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat dan tidak mengunggah ke situs yang bisa diakses bebas masyarakat karena akan menimbulkan *bullying* di masyarakat dan memicu tingginya angka kriminalitas baru, serta dalam pengambilan keputusan vonis apakah masyarakat bersalah harus melalui prosedur hukum dan penyelidikan tindak kejahatan bukan berdasarkan hasil dari penilaian *machine learning*. Rekaman cctv yang dikumpulkan pemerintah cukup dijadikan barang bukti, bukan jadi dasar untuk memvonis seseorang bersalah tanpa penyelidikan tindak kejahatan.

- ***If I told someone I respect (or a public audience) which option I have chosen, what would they say?***

Jika saya memberitahu seseorang yang saya hormati (atau audiensi publik) mengenai pilihan mana yang telah saya pilih, apa yang akan mereka katakan?

Jawab :

- Berdasarkan diskusi kami dengan Irfan Walhidayah Mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus selaku CEO/Founder dari aplikasi Rudaya menanggapi dari kebijakan *social credit system project ini*. Irfan menyebutkan bahwa “*kalau dari aku terdapat sisi negatif dan sisi positif dari kebijakan ini dan kemungkinan kebijakan yang diterapkan China ini akan mendunia nantinya. Dimana tahun 2030 kita akan memasuki era metaverse semua itu sudah bentuk virtual. Ada sisi positifnya itu dari pihak polisi itu tidak capek menangkap orang yang misalnya berbuat kejahatan atau membunuh dan lain sebagainya. Karena sudah diawasi dari sistem SCS itu, jadi jika ada tindak kriminal itu bisa langsung dilacak. Namun, sisi negatifnya itu privasi kita*



*diketahui sama negara. Misalnya kita membuka apa di smartphone itu dapat diketahui oleh negara. Tapi kembali lagi jika terdapat kontrol ataupun penanganan hal-hal negatif itu bisa lebih ke positif maka itu bisa dilaksanakan.”*

Kemudian Irfan menambahkan bahwa *“benar kan sistem machine learning itu kan buatan manusia. Namanya buatan manusia kan masih bisa di hacking atau diubah programnya. jangan-jangan nanti jika diterapkan maka bisa dipakai untuk menjatuhkan pejabat negara misalnya presiden. Buktinya itu diedit misalnya melakukan korupsi padahal kenyataannya tidak. Jadi tidak semua bisa diterapkan untuk machine learning itu, karena secanggih-canggihnya teknologi tidak bisa menggantikan semua pekerjaan manusia. Misalnya pekerjaan kepolisian yang melakukan penyelidikan orang yang berbuat jahat dan berbuat baik. dan apa mungkin jika sistem ini diterapkan kemudian kita rajin sembahyang kemudian sistemnya mencatat bahwa kita rajin sembahyang, menolong. dalam itikad baik atau agama kan itu kan gak bisa mencerminkan perilaku asli kita.”*

Berdasarkan option yang telah kami susun Irfan menanggapi solusi tersebut dengan mengatakan bahwa *“wah keren solusinya, bagus sih menurut aku, kalau dari solusi yang diberikan sesuai dengan kebijakan, disertai dengan perbaikan dari kebijakan yang telah diterapkan China. kalau menurut aku sangat bagus diterapkan di China bahkan jika diterapkan di Indonesia juga. misal seperti yang disebutkan tadi jika diterapkan di sekolah untuk siswa yang melakukan kecurangan misalnya mencontek tugas teman atau melakukan plagiasi maka langsung dapat diketahui pihak yang berwenang. menurutku itu perlu diterapkan sesuai dengan sektornya tadi seperti pendidikan, keuangan/financial gitu.”*

- Berdasarkan wawancara kami dengan Tarbiyatun Nafiah Mahasiswa program studi Sistem dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Bandung. Nafi menanggapi dari kebijakan *social credit system project* di China ini dengan pernyataan kurang setuju. *“Kalo dari aku, kurang setuju karena kesenjangan sosial akan menjadi semakin tinggi dan berakibat juga*

*pada ekonomi yg kaya semakin kaya dan yg miskin semakin miskin. Walaupun di sisi lain banyak positifnya seperti dapat memotivasi menjadi berbuat baik, tapi dampak dikucilkan dari masyarakat akan jauh lebih berat dan banyak jumlahnya. Karena dengan adanya hal itu, tidak menjamin juga di negara tersebut tidak ada kejahatan. Jadi, menurutku social credit ini perlu dikaji ulang dengan dampak-dampaknya dari semua aspek sudut pandang.”*

Kemudian Nafi juga menambahkan bahwa jika penilaian *social credit* ini menitikberatkan pada data rekaman cctv kemudian diolah dengan *machine learning* untuk memberikan poin atau *punishment* maka ini kurang tepat. *“banyak kasus yg sebenarnya baik di mata masyarakat tapi bisa saja di database nya dihitung buruk. Lalu kalau terjadi error, penilaian jadi tidak akurat, apabila terdapat hacker juga bisa mengubah penilaiannya.”*

Berdasarkan option yang telah kami susun Nafi menanggapi solusi tersebut dengan mengatakan bahwa *“Aku setuju ini raf (jika Menerapkan sistem social credit dengan batasan pengambilan data pribadi masyarakat yaitu hanya pada tempat-tempat atau sektor yang berkaitan. Misalnya untuk mendapatkan layanan transportasi maka penentuan pemblokiran layanan atau punishment hanya berdasarkan histori atau catatan perilaku atau sikap setiap individu. Atau jika melakukan kecurangan pada dunia pendidikan maka yang dibatasi adalah dalam hal dunia pendidikan. Jika melakukan pelanggaran dalam bidang keuangan maka yang dibatasi adalah layanan keuangan. Sehingga punishment diberikan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.), tapi tetap privasi pribadi tidak diumbar dengan mudah gitu. Menurutku itu cocok, karena memang perbuatan kita kan privasi dan itu tidak menimbulkan orang lain dikucilkan harusnya. Aku mikirnya ini relevan kayak jawabanku sebelumnya.”*

- ***How can my decision be implemented with the greatest care and attention to the concerns of all stakeholders?***

Bagaimana keputusan saya dapat dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan perhatian terhadap keprihatinan semua pemangku kepentingan?

Jawab :

Dalam mengimplementasikan decision adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan kajian tentang kebijakan yang akan diambil bersama berbagai pihak elemen masyarakat seperti ahli hukum, ahli teknologi informasi (*machine learning/AI*, database, *cyber security* dan sebagainya), pihak kepolisian, intelijen, serta *stakeholder* lainnya.
2. Pemerintah juga dapat melakukan survey terkait seberapa tingkat kriminalitas dan apa saja tingkat kriminalitas yang biasa terjadi pada suatu wilayah sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan-kebijakan terkait.
3. Pemerintah melakukan penyusunan mekanisme *social credit system* yang terdiri atas mekanisme keamanan data dan informasi pribadi masyarakat dan publik, algoritma sistem yang akan digunakan, spesifikasi kebutuhan sistem, tata kelola TI dari sistem, serta *stakeholder* yang bertanggung jawab untuk mengatur pemakaian sistem dan SOP pemberian akses manajemen hak akses yang akan menggunakan data tersebut. Serta pemerintah membuat regulasi tentang penerapan sistem dan bekerjasama dengan pihak lembaga pemerintahan lainnya seperti kepolisian, pendidikan, keuangan, informatika, dan infrastruktur/perhubungan dan sebagainya. Pemerintah juga menetapkan batasan pengambilan data pribadi masyarakat yaitu hanya pada tempat-tempat atau sektor yang berkaitan
4. Pemerintah membentuk tim untuk proses manajemen proyek pembuatan *social credit system* yang terdiri dari berbagai pihak.
5. Pemerintah melakukan perjanjian kontrak dengan vendor yang mengerjakan sistem, untuk mengatur sistem yang dibuat harus memenuhi spesifikasi dari yang telah ditetapkan.
6. Pemerintah melakukan pengawasan selama masa pengerjaan proyek agar sesuai dengan yang diharapkan, dan memastikan seluruh fungsionalitas dari sistem telah terpenuhi kemudian baru dapat melakukan penerimaan sistem.

7. Pemerintah melakukan *testing* dan masa percobaan sistem sebelum diimplementasikan ke masyarakat secara menyeluruh. Serta melakukan jajak pendapat penerimaan dari masyarakat.
8. Jika sistem yang telah dibuat telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, maka sistem dapat diimplementasikan. Setelah sistem diimplementasikan, pemerintah melakukan *monitoring* terhadap jalannya sistem.
9. Pemerintah memperkuat regulasi perundang-undangan dari penerapan sistem. Dan meninjau kembali secara berkala pengimplementasian sistem, khususnya sektor yang menerapkan sistem ini dan pihak-pihak berwenang yang mengatur penggunaan sistem,

## **2.5 Hasil Implementasi**

Setelah dilakukannya opsi pemilihan solusi dan mewawancarai beberapa pihak, didapatkan bahwa penerapan sistem *social credit system* ini memiliki dampak baik maupun buruk. Dampak baik dapat berupa terbantunya beberapa pihak seperti kepolisian untuk menjerat pelaku kejahatan dan lebih mengefektif dan mengefisienkan proses. Namun dampak buruk yang didapatkan adalah kemungkinan terkait adanya kesalahan dari sistem yang justru akan merugikan beberapa pihak yang sebenarnya tidak bersalah, hal ini akan menimbulkan ketidakadilan. Namun, jika diberikan beberapa solusi dan perbaikan yang merujuk arah positif maka penerapan sistem ini akan memberikan dampak positif.

Dalam proses pengimplementasian ini ada beberapa tahap yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah seperti melakukan survey dan kajian terkait bersama dengan pihak yang terhubung, pemerintah juga perlu untuk menyusun mekanisme, prosedur dan kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai *social credit system*. Setelah dilakukannya tahapan tersebut, maka sistem dapat diimplementasikan dan pemerintah tetap melakukan monitoring terhadap jalannya sistem.

Selama proses penulisan ini, perkiraan hasil implementasi yang kami dapatkan adalah bahwa penerapan *social credit system* ini akan memberikan banyak dampak positif apabila dimanfaatkan dengan benar dan dilakukan pembaruan sistem terus menerus untuk meningkatkan performa sistem. Sistem ini dinilai dapat memberikan keuntungan baik bagi pemerintahan maupun bagi kalangan masyarakat. Pada pemerintahan akan terbantu dalam

proses penyelidikan dan penyidikan kasus kriminal, sedangkan pada masyarakat dapat terbantu untuk memberikan rasa aman. Selama sistem diarahkan pada poin positif dengan membatasi data pribadi masyarakat, menerapkan daftar hitam yang diambil dari data valid berupa catatan kriminal dari kepolisian, bukan berdasarkan rekaman cctv. Selain itu, data-data masyarakat yang masuk hanya dapat diakses oleh pemerintah dan pihak berwajib sehingga sistem ini tidak digunakan sebagai bahan terjadinya diskriminasi dan bahan untuk mempermalukan masyarakat sehingga nilai keadilan akan tetap ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chorzempa, M., Triolo, P., & Sacks, S. (2018). China's Social Credit System: A Mark of Progress or a Threat to Privacy? *Jurnal Institut Peterson Ekonomi Internasional*.
- Kostka, G. (2019). China's social credit systems and public opinion: Explaining high levels of approval. *Sage Journals*.
- Padmananda, C. I., & Suyatna, I. N. (2020). What Indonesia Should Learn from China's Social Credit System?: Measuring Government Authorities and Citizen's Privacy Rights. *Udaya Journal of Law and Culture*.
- Prasetyo, D. (2021). SUBYEKTIFITAS DAN KEHIDUPAN SOSIAL DALAM DUNIA DIGITAL DI CHINA (MEMAHAMI HUBUNGAN ANTAR NEGARA DAN MASYARAKAT PADA ERA MEDIA DIGITAL). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*.